



Relevansi Pemikiran Politik R.A. Kartini dalam Politik Perempuan Indonesia: Perspektif Politik Gender dan Relasi Kuasa

Maya Dina Rahma Maghfiroh^{1*}, Agustinus Sugeng Priyanto²

¹⁻²Program Studi Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: mayadina507@students.unnes.ac.id^{1*}, atsugeng@mail.unnes.ac.id²

*Penulis korespondensi: mayadina507@students.unnes.ac.id¹

Abstract. Gender inequality in Indonesian politics forms part of broader structural and cultural dynamics that shape women's positions in the public sphere. In historical studies, the thought of R.A. Kartini is often interpreted primarily as a symbol of educational and moral emancipation, while the political dimension of her ideas receives limited attention. This study aims to examine Kartini's political thought as reflected in her letters, positioning her as a political subject who articulated critiques of social structures, customary norms, and patriarchal power relations through non-formal means. This research adopts a qualitative approach with a library-based research design. The data are derived from an analysis of Kartini's letters compiled in *Door Duisternis tot Licht* and supported by relevant academic literature. A descriptive-analytical method with a thematic approach is employed to explore political ideas and discourses embedded in the texts. Kartini's thought in this study is understood as a form of political awareness that extends beyond individual emancipation and relates to broader issues of women's political participation. This research contributes to the study of women's politics by offering a historical perspective that places women as political subjects.

Keywords: Gender; Political Thought; Power Relations; R.A. Kartini; Women's Politics

Abstrak. Ketimpangan gender dalam politik Indonesia hadir sebagai bagian dari dinamika struktural dan kultural yang memengaruhi posisi perempuan dalam ruang publik. Dalam kajian sejarah, pemikiran R.A. Kartini kerap dipahami sebatas simbol emansipasi pendidikan dan moral, sementara dimensi politik dalam gagasannya belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran politik R.A. Kartini sebagaimana tercermin dalam surat-suratnya, dengan menempatkan Kartini sebagai subjek politik yang menyuarakan kritik terhadap struktur sosial, adat, dan relasi kuasa patriarkal melalui medium non-formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka. Data diperoleh melalui analisis terhadap surat-surat Kartini yang terhimpun dalam *Door Duisternis tot Licht* serta literatur pendukung yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi gagasan dan wacana politik dalam teks. Pemikiran Kartini dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk kesadaran politik yang melampaui isu emansipasi individual dan berkaitan dengan persoalan partisipasi politik perempuan. Kajian ini memberikan implikasi teoretis bagi pengembangan studi politik perempuan dengan menghadirkan perspektif historis yang menempatkan perempuan sebagai subjek politik.

Kata kunci: Gender; Pemikiran Politik; Politik Perempuan; R.A. Kartini; Relasi Kuasa

1. LATAR BELAKANG

Ketimpangan gender dalam pembangunan dan praktik politik di Indonesia menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan. Dalam banyak kebijakan publik, perempuan masih lebih sering diperlakukan sebagai sasaran kebijakan dibandingkan sebagai aktor yang memiliki peran strategis dalam proses pengambilan keputusan. Dominasi relasi kuasa yang bersifat maskulin di ruang politik mempersempit peluang perempuan untuk terlibat secara setara.

Walaupun prinsip kesetaraan gender telah dilembagakan melalui berbagai regulasi dan kebijakan afirmatif, implementasinya belum sepenuhnya menghasilkan keterwakilan perempuan yang bermakna. Partisipasi perempuan dalam politik kerap bersifat formalistik dan

simbolik, sehingga belum mencerminkan keterwakilan yang substantif (Ardiansa, 2016; Damayanti dkk., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan perempuan dalam politik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan akses institusional, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya yang terus mereproduksi posisi subordinat perempuan sebagai subjek politik.

Dalam kajian politik perempuan, ketimpangan tersebut dipahami sebagai hasil dari relasi kuasa patriarkal yang dilembagakan melalui norma sosial, adat, serta pembagian peran berbasis gender (Irfany & Nashiri, 2025). Politik, dalam pengertian ini, tidak hanya merujuk pada aktivitas formal dalam institusi negara, tetapi juga mencakup proses bagaimana kekuasaan bekerja, dilegitimasi, dan direproduksi dalam kehidupan sosial (Budiardjo, 2022). Oleh karena itu, pengalaman perempuan dalam ranah sosial termasuk pendidikan, perkawinan, dan pengasuhan tidak dapat dipisahkan dari analisis politik, karena di dalamnya berlangsung negosiasi, pembatasan, dan resistensi terhadap relasi kuasa berbasis gender.

Persoalan ketimpangan gender tersebut sesungguhnya telah dikritik sejak masa kolonial, salah satunya melalui refleksi R.A. Kartini. Hidup dalam struktur feodal Jawa dan kekuasaan kolonial, Kartini mengalami secara langsung pembatasan terhadap perempuan melalui adat, sistem pendidikan, serta relasi kuasa dalam keluarga. Melalui surat-suratnya yang kemudian dihimpun dalam *Door Duisternis tot Licht*, Kartini merefleksikan pengalaman tersebut secara kritis dengan mempertanyakan legitimasi adat, praktik pingitan, poligami, serta pembatasan akses pendidikan bagi perempuan (Kartini, 2024; Kusuma, 2022). Refleksi ini menunjukkan bahwa pemikiran Kartini tidak berhenti pada isu emansipasi sosial, tetapi mengandung kesadaran politik terhadap struktur kekuasaan yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

Namun demikian, dalam kajian akademik, pemikiran Kartini masih lebih sering diposisikan sebagai wacana pendidikan atau simbol emansipasi perempuan. Sejumlah penelitian menempatkan Kartini dalam konteks historiografi, representasi budaya, maupun moral keagamaan (Amini, 2018; Chusna dkk., 2024), tetapi belum secara eksplisit membaca gagasan-gagasannya sebagai wacana politik yang beroperasi dalam relasi kuasa patriarkal dan kolonial. Akibatnya, dimensi politik dalam pemikiran Kartini cenderung tereduksi dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk membaca dinamika politik perempuan di Indonesia kontemporer.

Penelitian ini mengisi celah kajian tersebut dengan membaca pemikiran R.A. Kartini melalui perspektif politik gender dan relasi kuasa. Dengan memosisikan surat-surat Kartini sebagai praktik politik non-formal, penelitian ini menegaskan bahwa kritik Kartini terhadap adat, pendidikan, dan struktur sosial merupakan bentuk kesadaran politik perempuan yang

menantang konfigurasi kekuasaan pada masanya. Pembacaan ini tidak hanya memperkaya kajian pemikiran Kartini, tetapi juga menawarkan landasan konseptual untuk memahami persoalan keterwakilan, partisipasi, dan agensi perempuan dalam politik Indonesia kontemporer.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian politik perempuan berangkat dari asumsi bahwa ketimpangan gender dalam politik tidak dapat dipahami hanya melalui ukuran keterwakilan secara kuantitatif. Persoalan tersebut berkaitan erat dengan konfigurasi kekuasaan yang memengaruhi cara perempuan ditempatkan, diakui, dan diberi peran dalam ruang publik. Oleh karena itu, analisis politik perempuan menuntut pembacaan yang melampaui angka representasi menuju pemahaman atas mekanisme struktural yang bekerja di baliknya.

Dalam perspektif politik gender, gender dipahami sebagai konstruksi sosial dan politik yang membentuk perbedaan akses, legitimasi, serta otoritas individu dalam sistem kekuasaan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah politik tidak berlangsung secara alamiah atau setara, melainkan dikondisikan oleh struktur patriarki yang dilembagakan melalui norma sosial, adat, serta institusi politik formal maupun informal (Nurmadani dkk., 2025). Kerangka ini menegaskan bahwa ketimpangan gender merupakan hasil dari proses sosial-politik yang berlangsung secara sistemik dan berkelanjutan.

Politik gender menekankan bahwa pengalaman perempuan termasuk dalam ranah sosial dan budaya merupakan bagian dari proses politik itu sendiri. Ketimpangan yang dialami perempuan tidak hanya muncul dalam arena formal seperti parlemen atau partai politik, tetapi juga berakar dari pembagian peran berbasis gender yang membatasi perempuan sejak tahap awal kehidupan sosial, terutama dalam akses pendidikan dan pengambilan keputusan (Mufrikhah, 2020). Dengan demikian, analisis politik perempuan menuntut pembacaan yang melampaui batas institusional dan memasukkan dimensi relasi kuasa dalam kehidupan sosial.

Konsep relasi kuasa menjadi kerangka penting untuk memahami bagaimana dominasi gender direproduksi dan dinormalisasi. Relasi kuasa tidak selalu bekerja secara represif, tetapi juga melalui mekanisme simbolik, wacana, dan legitimasi sosial yang membuat ketimpangan tampak wajar (Luhukay, 2023). Dalam konteks politik perempuan, relasi kuasa patriarkal membentuk batasan-batasan implisit mengenai peran perempuan, baik dalam keluarga maupun dalam ruang publik, sehingga partisipasi perempuan sering kali bersifat terbatas dan simbolik.

Pemikiran R.A. Kartini dapat dibaca dalam kerangka politik gender dan relasi kuasa tersebut. Surat-surat Kartini merefleksikan kesadaran kritis terhadap struktur sosial yang

menempatkan perempuan dalam posisi subordinat melalui adat, praktik pingitan, poligami, dan pembatasan pendidikan. Kartini tidak hanya menggugat kondisi sosial perempuan, tetapi juga mempertanyakan legitimasi kekuasaan yang menopang praktik-praktik tersebut (Kartini, 2024; Kusuma, 2022). Kritik Kartini terhadap adat dan struktur feodal menunjukkan adanya resistensi terhadap relasi kuasa patriarkal yang bekerja secara kultural dan institusional.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji Kartini dari berbagai perspektif, seperti historiografi, representasi budaya, dan pendidikan perempuan. (Amini, 2018) menyoroti bias gender dalam penulisan sejarah Indonesia yang cenderung mereduksi peran Kartini sebagai simbol moral, sementara (Chusna dkk., 2024) membahas representasi Kartini dalam media budaya yang menunjukkan pergeseran makna perempuan modern. Penelitian lain menempatkan Kartini dalam konteks pendidikan dan agama sebagai fondasi kemajuan perempuan (Handak & Kuswanto, 2021; Wati. & Said, 2025). Namun, kajian-kajian tersebut belum secara eksplisit memosisikan pemikiran Kartini sebagai praktik politik yang beroperasi dalam relasi kuasa patriarkal dan kolonial.

Di sisi lain, studi-studi kontemporer mengenai politik perempuan di Indonesia lebih banyak berfokus pada isu keterwakilan, kuota gender, dan partisipasi formal perempuan dalam institusi politik (Fitri, 2025). Meskipun penting, pendekatan tersebut cenderung menempatkan perempuan sebagai objek kebijakan, tanpa menggali akar historis dan wacana politik yang membentuk kesadaran perempuan sebagai subjek politik.

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, penelitian ini memadukan perspektif politik gender dan relasi kuasa untuk membaca pemikiran R.A. Kartini sebagai bentuk kesadaran politik perempuan. Dengan menempatkan surat-surat Kartini sebagai wacana politik non-formal, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa kritik Kartini terhadap struktur sosial dan adat merupakan praktik politik yang relevan untuk memahami dinamika politik perempuan di Indonesia, baik dalam konteks historis maupun kontemporer.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang untuk menjelaskan objek kajian melalui pemilihan pendekatan, teknik pengumpulan data, serta strategi analisis yang relevan dengan tujuan penelitian. Uraian metode difokuskan pada aspek-aspek utama penelitian, sementara prosedur teknis yang bersifat umum tidak dijabarkan secara rinci dan dirujuk pada sumber metodologis yang telah mapan. Dengan demikian, penjelasan metode diarahkan pada kejelasan rancangan dan konsistensi analisis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis gagasan, pemikiran, dan konstruksi makna yang terdapat dalam sumber-sumber tertulis. Data diperoleh melalui penelusuran literatur berupa buku, artikel ilmiah, dan dokumen relevan yang berkaitan dengan politik perempuan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fokus penelitian (Creswell, 2018).

Populasi penelitian dalam studi ini berupa seluruh dokumen tertulis yang berkaitan dengan pemikiran R.A. Kartini serta kajian akademik mengenai politik perempuan, politik gender, dan relasi kuasa. Sampel penelitian ditentukan secara purposif, yaitu kumpulan surat R.A. Kartini yang dihimpun dalam *Door Duisternis tot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang)* sebagai sumber data utama, serta artikel jurnal dan buku ilmiah yang relevan sebagai data pendukung.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus kajian. Proses tersebut mencakup penelusuran, pencatatan, serta pemilahan literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengendalikan proses pengumpulan dan analisis data. Untuk menjaga konsistensi analisis, peneliti menggunakan pedoman analisis yang disusun berdasarkan konsep politik gender dan relasi kuasa. Pedoman ini dimanfaatkan untuk mengidentifikasi tema, wacana, serta pola relasi kekuasaan yang termuat dalam teks yang dianalisis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengelompokkan dan menafsirkan data berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian. Proses analisis mencakup pemilahan data, pengorganisasian temuan, serta perumusan simpulan secara bertahap dengan mengacu pada prinsip analisis penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016).

Dalam proses analisis, teks surat-surat R.A. Kartini diperlakukan sebagai wacana politik non-formal yang merefleksikan kritik terhadap struktur sosial, adat, serta relasi kuasa patriarkal. Penafsiran dilakukan dengan menempatkan teks dalam konteks sosial-historis zamannya, sehingga makna politik yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara komprehensif.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan yang diperoleh dari teks primer dengan hasil penelitian serta kajian akademik sebelumnya. Langkah

ini memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan memiliki konsistensi argumentatif dan relevansi teoretis, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Model penelitian yang digunakan bersifat interpretatif-kualitatif, yaitu menempatkan teks sebagai arena produksi makna dan kekuasaan. Dalam model ini, pemikiran R.A. Kartini dipahami sebagai hasil interaksi antara struktur sosial, gender, dan relasi kuasa, yang kemudian dianalisis untuk melihat relevansinya dalam konteks politik perempuan di Indonesia. Hubungan antar konsep dijelaskan secara naratif tanpa penggunaan simbol matematis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

sumber-sumber tertulis yang dikumpulkan dalam rentang waktu 2025–2026. Seluruh data diperoleh tanpa melibatkan penelitian lapangan, karena fokus kajian diarahkan pada penelusuran dan pembacaan kritis terhadap dokumen teks.

Sumber utama penelitian berupa kumpulan surat R.A. Kartini yang terhimpun dalam *Door Duisternis tot Licht*, yang diperlakukan sebagai teks historis sekaligus wacana politik non-formal. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber pendukung berupa artikel jurnal ilmiah dan buku akademik yang membahas politik perempuan, politik gender, serta relasi kuasa. Integrasi antara sumber primer dan sekunder tersebut memungkinkan pembahasan dilakukan secara kontekstual dan analitis.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan pengelompokan sumber berdasarkan kesesuaian tema penelitian. Seluruh data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi gagasan utama, bentuk kritik sosial, serta mekanisme relasi kuasa yang tercermin dalam pemikiran Kartini.

Pemikiran Politik R.A. Kartini dalam Perspektif Politik Gender

Kesadaran Politik Perempuan dalam Surat-Surat Kartini

Hasil analisis menunjukkan bahwa surat-surat Kartini mengandung kesadaran politik perempuan yang kuat, terutama dalam menyoroti ketimpangan peran gender. Kesadaran tersebut tampak dalam beberapa aspek berikut:

- a. Kritik terhadap pembatasan peran perempuan melalui adat dan tradisi.
- b. Penolakan terhadap pembatasan akses pendidikan bagi perempuan.
- c. Refleksi pengalaman personal sebagai bentuk artikulasi politik perempuan.

Dalam salah satu suratnya, Kartini mempertanyakan masa depan perempuan yang sejak awal telah ditentukan oleh struktur sosial, dengan menulis: “*Saat dewasa nanti, saya akan jadi apa? Seorang Raden Ayu*” (Kartini, 2024). Kutipan ini menunjukkan bagaimana identitas

perempuan direduksi ke dalam status sosial dan perkawinan, bukan sebagai subjek yang memiliki kehendak dan kapasitas berpikir.

Merujuk pada perspektif politik gender, pengalaman sosial yang dituliskan Kartini tidak dapat dipahami sebagai narasi individual semata, melainkan sebagai representasi relasi kuasa yang bekerja secara sistemik dalam masyarakat patriarkal. Surat-surat tersebut menjadi medium artikulasi kesadaran kritis perempuan terhadap struktur yang menempatkannya dalam posisi subordinat.

Kritik terhadap Struktur Patriarki dan Feodalisme

Kartini secara konsisten mengkritik struktur patriarki dan feodalisme Jawa yang melegitimasi subordinasi perempuan melalui adat, etika sosial, dan hierarki bangsawan. Dalam suratnya kepada Stella Zeehandelaar, Kartini menggambarkan bagaimana adat dan etika feodal membatasi kebebasan berpikir dan bertindak perempuan: *“Demi memberimu gagasan betapa menyesakkannya etika kami ini, saya akan memberimu beberapa contoh”* (Kartini, 2024).

Kritik tersebut mencerminkan resistensi terhadap kekuasaan yang dilembagakan melalui norma sosial dan legitimasi budaya. Temuan ini menegaskan bahwa pemikiran Kartini mengandung dimensi politik yang berorientasi pada perubahan struktur sosial, bukan sekadar perbaikan moral individu. Dalam kerangka relasi kuasa, feodalisme dan patriarki berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang mempertahankan dominasi laki-laki atas perempuan.

Relasi Kuasa dalam Pemikiran Kartini dan Relevansinya dengan Politik Perempuan Indonesia

Surat Kartini sebagai Praktik Politik Non-Formal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat-surat Kartini dapat dipahami sebagai praktik politik non-formal. Melalui korespondensi pribadi, Kartini membangun wacana kritis dan menegosiasikan posisi perempuan dalam struktur kekuasaan kolonial dan feodal. Surat-surat tersebut berfungsi sebagai ruang diskursif yang memungkinkan perempuan menyuarakan kritik tanpa harus terlibat langsung dalam institusi politik formal.

Temuan ini memperluas pemahaman politik sebagai praktik yang tidak terbatas pada negara atau lembaga formal, tetapi juga mencakup ruang wacana yang memungkinkan perempuan membangun agensi politik dan kesadaran kolektif.

Keterkaitan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan dalam penelitian ini memperkuat hasil-hasil kajian sebelumnya yang mengungkap bahwa representasi perempuan dalam politik Indonesia kerap berhenti pada tataran simbolik. Namun demikian, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang berbeda

dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya memaknai Kartini sebatas sebagai ikon pendidikan atau figur emansipasi moral.

Dalam penelitian ini, Kartini dipahami sebagai aktor politik yang secara sadar menggunakan medium non-formal untuk menyampaikan kritik dan melakukan negosiasi terhadap relasi kuasa yang membatasi posisi perempuan. Melalui surat-suratnya, Kartini tidak hanya merefleksikan pengalaman personal, tetapi juga membangun wacana politik yang menantang struktur sosial dan budaya patriarkal pada masanya.

Implikasi Teoretis dan Terapan

Implikasi terhadap Kajian Politik Perempuan

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pendekatan politik gender dalam membaca pemikiran perempuan Indonesia. Pemikiran Kartini tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga dapat digunakan sebagai landasan konseptual untuk memahami persoalan keterwakilan, partisipasi, dan agensi perempuan dalam politik kontemporer.

Secara terapan, penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan politik yang tidak hanya berorientasi pada kuota representasi, tetapi juga pada transformasi relasi kuasa yang masih membatasi perempuan sebagai subjek politik.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Surat R.A. Kartini dalam *Door Duisternis tot Licht*.

Fokus Analisis	Bentuk Kritik Kartini	Relevansi Politik
Pendidikan	Pembatasan akses perempuan	Agensi politik perempuan
Adat	Legitimasi patriarki	Relasi kuasa gender
Peran sosial	Subordinasi perempuan	Politik non-formal

Sumber: Diolah dari surat-surat R.A. Kartini (Door Duisternis tot Licht).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran politik R.A. Kartini, sebagaimana tercermin dalam surat-suratnya, mengandung kesadaran politik perempuan yang bersifat kritis dan struktural. Kartini tidak sekadar merefleksikan pengalaman personal sebagai perempuan Jawa, melainkan mengartikulasikan kritik terhadap relasi kuasa yang bekerja melalui patriarki

dan feodalisme dalam masyarakat. Dalam perspektif politik gender, perempuan dipahami Kartini sebagai subjek sosial yang memiliki kapasitas berpikir, menilai, dan memengaruhi tatanan sosial, meskipun berada dalam keterbatasan struktur yang mengekang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan diposisikan Kartini sebagai instrumen strategis untuk membangun kesadaran kritis perempuan dan menegosiasikan posisi mereka dalam struktur kekuasaan. Surat-surat Kartini dapat dipahami sebagai praktik politik non-formal yang memungkinkan perempuan membangun agensi politik melalui ruang diskursif, di luar institusi politik formal. Pemikiran ini tetap relevan dalam konteks politik perempuan Indonesia kontemporer, terutama dalam membaca persoalan representasi yang masih bersifat simbolik dan belum sepenuhnya diiringi oleh transformasi relasi kuasa yang substantif.

Penelitian ini menyarankan agar kajian politik perempuan di Indonesia tidak hanya berfokus pada peningkatan representasi numerik, tetapi juga pada analisis kritis terhadap struktur sosial, budaya, dan kekuasaan yang membentuk posisi perempuan dalam politik. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan konseptual bagi perumusan kebijakan yang mendorong partisipasi politik perempuan secara substantif, bukan sekadar formalitas institusional.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan sumber data yang sepenuhnya berbasis studi pustaka, sehingga tidak memungkinkan eksplorasi empiris terhadap praktik politik perempuan di tingkat lokal atau kontemporer. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan kajian pemikiran Kartini dengan penelitian lapangan guna menguji relevansi gagasannya dalam praktik politik perempuan masa kini, baik pada level lokal maupun nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Amini, M. (2018). Gender bias in historiography of Indonesia and the writing of women's history. *Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesenjangan*, 23, 153–160. <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>
- Ardiansa, D. (2016). Menghadirkan kepentingan perempuan dalam representasi politik di Indonesia. *Jurnal Politik*, 2(1). <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.1127>
- Budiardjo, M. (2022). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Chusna, A., Utami, S., & Subuhi, M. I. (2024). Kartini in two lenses: The shifting image of Indonesian modern woman in *R.A. Kartini* (1982) and *Kartini* (2017). *Informasi*, 53(2), 215–228. <https://doi.org/10.21831/informasi.v53i2.61378>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*.

- Damayanti, K., Anisti, C., Rizanul, R., & Ummah, A. (2024). Analisis kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2026>
- Fitri, A. N. (2025). Women's representation in the Indonesian parliament and the impact of the 30 percent quota on gender-responsive policies. *Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, 20(1). <https://doi.org/10.24090/yinyang.v20i1.13950>
- Handak, I., & Kuswanto. (2021). Menelaah urgensi pendidikan bagi perempuan sesuai dengan pemikiran R.A. Kartini. *Jurnal PTK dan Pendidikan*, 7(1). <https://doi.org/10.18592/ptk.v7i1.4701>
- Irfany, A., & Nashiri, A. (2025). The role of patriarchal culture in hindering women's participation in the political arena, especially in a Muslim-majority democracy. *Journal of Political Islam (JOPI)*, 1(2). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jopi/index>
- Kartini, R. A. (2024). *Habis gelap terbitlah terang (Door duisternis tot licht)* (N. R. Artanti, Trans.). Narasi.
- Kusuma, A. (2022). Kartini dan pemikirannya: Menyelami gagasan kritis sosok perempuan Jawa di akhir abad XIX. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 7(4), 284–293. <https://doi.org/10.24815/jimps.v7i4.22676>
- Luhukay, M. S. (2023). Wacana relasi kuasa Foucault dalam bingkai profesi public relations perempuan di Indonesia. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14.
- Mufrikhah, S. (2020). Keterbatasan kuota perempuan di parlemen lokal Indonesia: Analisis kondisi kultural dan institusional yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 2(2), 47–66. <https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8070>
- Nurmadani, Herman, Darmawan, M. R., & Danny, F. (2025). Gender dalam perspektif aliran feminisme: Analisis wacana tentang hakikat dan kedudukan perempuan. *Journal of Gender and Millennium Development Studies*, 2(2), 53–62. <https://doi.org/10.64420/jgmids.v2i2>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wati, A., & Said, A. (2025). Pendidikan perempuan sebagai kunci kemajuan: Perspektif R.A. Kartini dan Islam. *Millatuna: Jurnal Studi Islam*, 2(3), 36–47. <https://doi.org/10.33752/mjsi.v2i03.9021>